

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : BPK

Halaman 9

## Dana Haji Mulai Dialihkan

● BINTI SHOLIKAH

### BPKH masih belum bisa menginvestasikan dana haji.

JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mengambil alih sebagian dana haji dari Kementerian Agama. Pengambilalihan dana haji tersebut dimulai sejak Januari 2018.

Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, penyerahan dana haji dari Kemenag kepada BPKH dilakukan secara bertahap. Dana tersebut tidak bisa diserahkan secara sekaligus.

"Sudah diserahkan sebagian, ada beberapa yang belum. Yang diserahkan baru dana haji yang ditempatkan di bank," kata Anggito saat dihubungi *Republika*, Kamis (8/2).

Anggito menyebut, dana haji yang belum diserahkan antara lain, dana abadi umat (DAU) yang nilainya sekitar Rp 3 triliun. Sementara dana haji yang ditempatkan di bank juga belum semuanya diserahkan. "Yang setoran awal sudah diserahkan," ujarnya.

Meski sebagian dana haji sudah diserahkan, kata dia, saat ini BPKH belum bisa melakukan investasi dana haji. Sebab, laporan keuangan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum diserahkan kepada BPKH. Selain itu, peraturan pemerintah (PP) yang menjadi acuan BPKH dalam menginvestasikan dana haji juga belum diteken. Sehingga, BPKH masih menunggu hasil audit BPK dan keluarnya PP. "Kalau laporan audit belum diserahkan, kami tidak berani berinvestasi," ujarnya.

Mengenai rencana investasi tersebut, Anggito menyatakan saat ini BPKH masih menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT). Dia enggan menyebut investasi

mana yang potensial untuk dimasuki BPKH.

Sebelumnya, sektor infrastruktur menjadi pembahasan yang akan dimasuki BPKH untuk investasi.

Bahkan, CEO Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto menyatakan, BPKH tertarik untuk masuk proyek *power generation* yang difasilitasi PINA. Proyek tersebut digarap oleh perusahaan konstruksi BUMN, yakni PT PP (Persero) Tbk.

Total investasi untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Proyek yang direncanakan di Meulaboh, Aceh tersebut ditargetkan dimulai pada kuartal I 2018. "*Power generation* juga kita arahkan ke mereka, tapi tidak terbatas pada mereka, ada juga dana haji. Jadi, BPKH juga sangat tertarik untuk masuk tapi tentunya syariah ya untuk yang *power generation*," ungkap Ekoputro kepada wartawan di kantor Bappenas, belum lama ini. Namun, Ekoputro belum bisa menyebut porsi investasi yang diajukan oleh masing-masing calon investor.

Mengenai rencana investasi di proyek PINA tersebut, Anggito Abimanyu mengaku tidak mengetahui. Dalam penyusunan Renstra dan RKAT tersebut, tidak ada penyebutan nama perusahaan tujuan investasi. "Kami itu kalau mau mengajukan investasi ada proposal," kata Anggito.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Benny Witjaksono menyatakan belum bisa membeberkan rencana investasi karena PP belum keluar. Namun, dia memastikan pemerintah dan BPKH aktif berkomunikasi mengenai PP tersebut. "Jadi belum bisa dipakai untuk investasi, jadi *status quo*," ungkapnya saat dihubungi *Republika*.

Sebelum diserahkan kepada BPKH, portofolio investasi dana haji ditempatkan di deposito sebesar 60 persen, surat berharga syariah negara (SBSN) 39 persen, dan giro 0,6 persen.

■ ed: satria kartika yudha